



► PENANGGULANGAN COVID-19

Sultan Sayangkan Warga Masih Abai Prokes

Sunartono & Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyalahkan sebagian besar masyarakat yang mulai mengabaikan protokol kesehatan (prokes). Menurut Sultan, turunnya kasus Covid-19 beberapa waktu lalu, memunculkan anggapan di sebagian besar warga bahwa DIY sudah bebas dari Covid-19.

“Masyarakat *rumangsane* Jogja se Jawa Bali rendah sekali *mung kari* 10 [kasus Covid-19 harian] *uwong* [orang] *rumangsane* [dikira] terus bebas biar pun kita selalu ngomong tetap prokes itu dilakukan. Tapi anggapan masyarakat sepertinya *wis bebas*,” ujarnya di kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (3/2).

Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu meminta kepada semua pihak untuk memperketat prokes di semua level demi mencegah meluasnya penularan Virus Corona.

Sultan Sayangkan...

Masyarakat diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Sultan mengatakan hingga Kamis belum ada arahan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan pengetatan dan pembatasan. Pengetatan di semua level sebenarnya bisa saja dilakukan. Akan tetapi saat ini memang sulit diterapkan dengan melihat kondisi di lapangan. "Ya pengetatan di semua level ya, tapi itukan kalau saya hanya pengetatan, ya kita bisa ngomong tapi faktanya di lapangan kita tidak [menerapkan]. Masyarakat semuanya tidak terus patuh 100 persen juga enggak, apalagi ngomong berkerumun tidak semudah yang ditulus, faktanya itu begitu," katanya.

Terkait dengan kenaikan yang terjadi signifikan di DIY, Sultan menilai meningkatnya kasus itu terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dapat memahami kondisi fisik masing-masing. "Ya memang semua naik semua karena tidak bisa [prokes], tapi kita akan mengeluarkan ketentuan baru ya. Saya minta masyarakat bisa memahami kondisi fisiknya sendiri-sendiri ya karena biarpun ringan sedang," katanya.

Ia mengatakan jika masyarakat merasa batuk dan tenggorokan kurang nyaman dan sejenisnya, disarankan untuk swab dan jika positif segera isolasi mandiri. Namun persoalannya jika tidak memiliki gejala yang justru berpotensi menimbulkan penularan.

Varian Omicron

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, berpendapat penularan yang terjadi secara masif di DIY bukan karena varian Omicron.

Kasus Omicron di DIY, kata dia, belum tampak jelas dan hanya ada satu kasus, itu pun warga DKI Jakarta yang saat ini sudah kembali ke daerah asal. Menurutnya kenaikan itu terjadi karena masyarakat

sudah mengabaikan prokes.

"Masyarakat sudah mulai abai terhadap prokes. Jadi menurut kami bukan karena Omicron tetapi karena memang abai prokes," ujarnya.

Aji mengatakan wisatawan baik dari luar maupun dalam DIY dimungkinkan turut menjadi penyebab jika mereka abai terhadap prokes.

"Kedua, karena wisatawan yang datang bukan hanya dari luar ya, kita sendiri ini kan berwisata di sini itu juga abai prokes. Kalau kita lihat dari Omicron di Jogja, belum kelihatan, baru dari hasil WGS (*whole genome sequencing*) hanya satu orang itu pun dari Jakarta," katanya.

Selain itu, pembelajaran tatap muka (PTM) juga turut menyumbangkan kenaikan kasus. "PTM juga menambah terus, SMA di Bantul, Kota dan Sleman juga sudah banyak terpapar," ujarnya.

Baskara Aji menambahkan koordinasi dengan kabupaten dan kota telah dilakukan dalam rangka menyiapkan isoter untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19. Isoter tersebar di berbagai wilayah DIY yang saat ini dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Total kapasitas yang tersedia untuk 3.000 orang dengan rata-rata 600 orang setiap kabupaten/kota.

"Di Kulonprogo saja mampu menampung total 800 orang, Kota Jogja juga disiapkan, Sleman di Wisma Haji. Kalau di rata-rata masing-masing kabupaten dan kota mampu menampung 600-an sehingga saat ini siap untuk menampung 3.000 seluruh DIY," katanya.

Aji menambahkan Pemda DIY juga mendapatkan masukan dari PT KAI untuk menggunakan sejumlah gedung yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kemungkinan kabupaten dan kota sudah penuh. Pilihan lain, Hotel Mutiara yang ada di Jalan Malioboro juga siap dipakai

untuk isoter.

"Hotel Mutiara ini dua-duanya siap, tetapi mungkin lebih representatif yang selatan, kamarnya lebih banyak, punya halaman juga," ujarnya.

Ia mengatakan selain fasilitas infrastruktur DIY juga bersiap dengan obat-obatan. Melalui Dinas Kesehatan telah mengajukan belanja untuk obat-obatan. Begitu juga dengan BPBD DIY telah menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD).

"Termasuk *telemedicine* kami siapkan sehingga sewaktu-waktu pasien yang isolasi mandiri bisa dipantau diberikan obat secara gratis," katanya.

Penambahan Kasus

Sementara itu, kasus Covid-19 DIY terus menunjukkan tanda peningkatan secara signifikan. Pada Kamis tercatat penambahan sebanyak 219 kasus. Adapun kasus aktif di seluruh DIY tercatat 835 kasus.

Kabag Humas Biro UHP Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji, menjelaskan penambahan 219 kasus itu mayoritas dari Sleman sebanyak 149 kasus, disusul Bantul (36), Kota Jogja (23), Gunungkidul (7), dan Kulonprogo (4).

Ketua Pokja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Gunadi, mengatakan hingga Kamis siang lembaganya menerima puluhan sampel swab Covid-19 untuk diteliti menggunakan metode WGS.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 sampel hasil WGS sudah disampaikan kepada Pemda DIY pada pekan lalu.

"Yang sudah kami laporkan 33 sampel hasil WGS, satu di antaranya pelaku perjalanan [luar kota] yang positif varian Omicron," katanya.

Saat ini, lembaganya terus memeriksa sampel swab Covid-19 yang dikirim dari berbagai wilayah di DIY. Terdapat setidaknya 48 sampel yang sedang diteliti termasuk sampel swab dari klaster sekolah Al-Azhar.

LEVEL PPKM DI SEJUMLAH DAERAH NAIK

Pemerintah mengubah indikator penetapan tingkat level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga sejumlah daerah mengalami kenaikan level. Kebijakan itu didasarkan pada Inmendagri No.6 dan No.7/2022.

Pemberlakuan PPKM

Jawa Bali
1-7 Februari 2022

Indikator

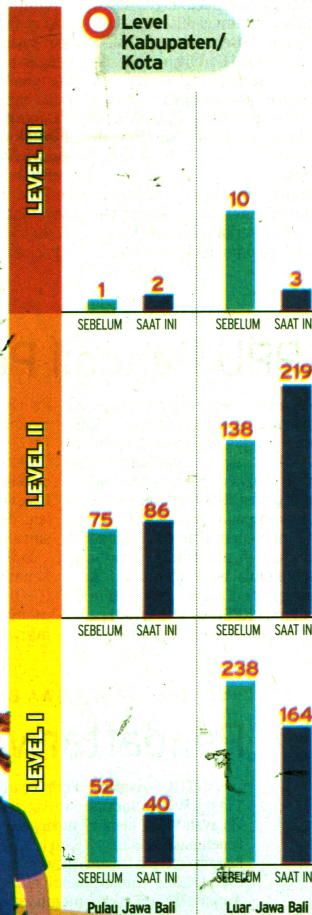
- Penyesuaian upaya kesehatan masyarakat.
- Pembatasan sosial
- Capaian Vaksinasi
- Level I umum lebih dari 70% dan lansia lebih dari 60%.
- Level II umum lebih dari 50% dan lansia lebih dari 40%.
- Penyesuaian indikator juga berlaku untuk wilayah aglomerasi.



Luar Jawa-Bali
1-14 Februari 2022

Indikator

- Penyesuaian upaya kesehatan masyarakat.
- Pembatasan sosial
- Capaian Vaksinasi kurang 50%.



Instruksi & Imbauan

Kepala Daerah

- Melarang aktivitas yang menimbulkan kerumunan.
- Tidak menahan suplai vaksin untuk stok.
- Membatasi mobilitas masyarakat dan menguatkan 3T.

Masyarakat

- Waspada dan disiplin protokol kesehatan.
- Menunda bepergian.
- Segera mendapatkan vaksinasi lengkap.

Grafis: Harlan Jogla/Tri H | Sumber: Kemendagri/Satgas Covid-19

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005